

KEPENTINGAN INDONESIA BERGABUNG KEMBALI KE OPEC PADA TAHUN 2015

Oleh: Della Putri Harbad
e-mail : dellaph43@gmail.com

Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas Riau
Kampus Bina Widya km. 12,5 Simpang Baru – Pekanbaru 28293
Telp. (0761) 63277, 23430

Abstract

This research is about Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) an organization that has obligation to keep production and stabilize the world petroleum pricing that have to be focused for obligation that have been out by OPEC for cut the world production petroleum in 2016 to stabilize the world petroleum prices and the impact that affect Indonesia as one of the member of OPEC. This research discusses about “Indonesia’s politics and economics interest by rejoin OPEC in 2015”. The purpose of this research is to know why Indonesia decided to rejoin OPEC in 2015.

This is qualitative research which used descriptive explanative methods, and collecting datas from books, journals, articles, mass media, official publications and relevant websites. This paper used the neo-liberalism perspective written by David Harvey.

The result of this research is that Indonesia rejoin OPEC in 2015 because of the politics and economics interests that Indonesia has to improve its development of energy defence and to make Indonesia has more strategic role in world oil production and distribution.

KeyWords: Keywords: OPEC, Economics and Politics Interest, Neo-Liberalism.

Pendahuluan

Kegiatan ekspor – impor didasari oleh kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Dalam hal ini, OPEC (*Organization of the Petroleum Exporting Countries*) memiliki peranan yang sangat penting. *Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC) atau Organisasi Negara Pengekspor Minyak Bumi merupakan organisasi yang bertujuan menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. OPEC berupaya menstabilkan harga minyak di pasar internasional dan menjamin kesinambungan pasokan minyak kepada negara-negara konsumen. Salah satu cara untuk menjaga stabilitas pasar minyak internasional adalah melalui penentuan kuota (batas tertinggi) produksi minyak berdasarkan kesepakatan negara anggota. Dalam perdagangan internasional, OPEC menguasai 55% minyak dunia. Karena itu OPEC memegang peranan penting dalam masalah perminyakan internasional, terutama dalam hal menaikkan dan menurunkan tingkat produksinya. Di samping itu OPEC juga terlibat aktif dalam usaha peningkatan perdagangan internasional serta konservasi lingkungan.

Perspektif yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu perspektif neoliberalisme yang

mengutarakan kepentingan nasional oleh **K.J. Holsti**. Neoliberalisme adalah pada tingkat pertama teori praktek ekonomi politik yang mengusulkan bahwa manusia dengan wujud terbaik dapat maju dengan membebaskan kebebasan kewirausahaan individu dan keterampilan dalam kerangka kelembagaan yang kuat ditandai dengan hak kepemilikan pribadi, pasar bebas dan perdagangan bebas.¹

Melihat Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang menghasilkan minyak bumi di Asia tenggara dan merupakan salah satu Anggota dari OPEC. Pada tahun 2008, Negara Indonesia memutuskan untuk keluar dari OPEC setelah 46 tahun lamanya bergabung sejak Desember 1962 dikarenakan krisis minyak bumi yang melanda Negara di dunia dan tingginya permintaan BBM domestic yang tidak diimbangi dengan produksi minyak bumi, dimana awalnya Indonesia bisa mengekspor minyak bumi menjadi Negara yang mengimpor minyak bumi (net oil importer) dan tidak bisa memenuhi target kuota yang ditetapkan. Kebijakan yang diambil oleh OPEC adalah memangkas produksi minyak sebesar 1,2 juta barel perhari, dimana Indonesia dalam hal ini diharuskan mengurangi produksi minyak hingga 37.000 barel perhari. Permintaan ini tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah Indonesia yang justru ingin meningkatkan penerimaan dari sector minyak dan gas bumi.

¹ “Ruang dan Waktu dalam Pemikiran David Harvey”, diakses dari <https://indoprogress.com/2013/05/ruang-dan->

[waktu-dalam-pemikiran-david-harvey/](https://indoprogress.com/2013/05/ruang-dan-waktu-dalam-pemikiran-david-harvey/), pada tanggal 10 April 2018 pukul 21.57 wib

Pada tahun 2015 dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia telah mengajukan diri untuk bergabung kembali pada keanggotaan OPEC setelah 7 tahun ditanggihkan keanggotaannya oleh OPEC. Pemerintah memiliki alasan ingin mengambil manfaat yang maksimal dan sebesar-besarnya apabila Indonesia aktif kembali di dalam OPEC. Aktifnya kembali Indonesia di OPEC juga dipercaya akan memberikan keuntungan dan semakin mempererat hubungan dengan Negara-negara pengekspor minyak yang ada. Penulis mencoba menemukan penentangan masalah dalam penelitian ini yakni **“Mengapa Indonesia berkepentingan untuk bergabung kembali ke OPEC pada tahun 2015?”**

Tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menjelaskan gambaran umum OPE.C
2. Menjelaskan posisi Indonesia dalam keanggotaannya di OPEC.
3. Menjelaskan kepentingan ekonomi politik Indonesia bergabung kembali ke OPEC pada tahun 2015.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif eksplanatif. Penulis akan menjelaskan apa kepentingan Indonesia bergabung kembali ke OPEC pada tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan data-data dalam berbagai sumber tulisan. Data-data dalam penulisan sangat berguna dalam pembuktian dari sebuah hipotesa dan pencarian

jawaban. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik library research, dengan memanfaatkan buku-buku, jurnal-jurnal dan artikel-artikel dari berbagai media seperti internet ataupun e-book.

Pembahasan

OPEC adalah singkatan dari kepanjangan Organization of Petroleum Exporting Countries. OPEC adalah organisasi tempat berkumpulnya negara-negara pengekspor minyak. Organisasi OPEC didirikan pada 14 September 1960 oleh lima negara anggota: Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela, yaitu setelah diselenggarakannya Konferensi Baghdad 10-14 Agustus 1960 yang diikuti oleh lima negara produsen minyak tersebut. Markas OPEC semula berada di Jenewa (21 Januari 1961-Agustus 1965) kemudian pindah ke Wina. Di awal pembentukannya, disepakati bahwa OPEC bertujuan untuk menjaga stabilitas harga minyak internasional demi kepentingan negara-negara anggotanya. Negara anggota OPEC antara lain adalah Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Selain kelima Negara pendiri tersebut, para anggota OPEC adalah Qatar, Libya, Indonesia, Uni Emirat Arab, Aljazair, Nigeria, dan Ekuador, yang semuanya berstatus sebagai anggota penuh, serta Gabon dengan status sebagai peninjau (associate member). Adapun syarat utama bagi keanggotaan di dalam OPEC antara lain adalah Negara yang bersangkutan secara substansial merupakan pengekspor minyak mentah. Selain itu, secara fundamental Negara tersebut juga mempunyai kepentingan yang sama dengan negara-

negara (yang sudah menjadi) anggota. Untuk bergabung dalam keanggotaan OPEC, suatu Negara juga butuh kesepakatan penuh oleh mayoritas anggota OPEC.

Secara umum, tujuan OPEC dibagi menjadi dua tujuan utama, yaitu tujuan ekonomi dan tujuan politik. Adapun tujuan OPEC secara ekonomi adalah untuk mempertahankan harga minyak dan menentukan harga sehingga menguntungkan negara-negara produsen, sedangkan tujuan OPEC secara politik adalah untuk mengatur hubungan dengan perusahaan-perusahaan minyak asing atau pemerintah negara-negara konsumen. Saat ini, OPEC telah berusia 56 tahun. OPEC pun kini telah menetapkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu *“preserving and enhancing the role of oil as a prime energy source in achieving sustainable economic development”*. Untuk mencapai tujuan ini, OPEC pun telah menyusun berbagai strategi, misalnya koordinasi dan unifikasi kebijakan perminyakan antar negara anggota, menetapkan strategi yang tepat untuk melindungi kepentingan negara anggota, menerapkan cara-cara untuk menstabilkan harga minyak di pasar internasional sehingga tidak terjadi fluktuasi harga, menjamin income (pendapatan) yang tetap bagi negara-negara produsen minyak, menjamin suplai minyak bagi konsumen, serta menjamin kembalinya modal investor di bidang minyak secara adil. OPEC juga memiliki kebijakan-kebijakan lain, yakni menyatukan kebijakan perminyakan antara negara-negara anggota, memenuhi kebutuhan dunia akan minyak bumi, menstabilkan harga minyak dunia, menentukan

kebijakan-kebijakan untuk melindungi negara-negara anggota.

Indonesia telah menjadi anggota OPEC sejak tahun 1962. Sejak menjadi anggota OPEC, Indonesia ikut berperan aktif dalam penentuan arah dan kebijakan OPEC. Keikutsertaan ini khususnya dalam kegiatan stabilisasi jumlah produksi dan harga minyak di pasar Internasional. Keikutsertaan Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 2004, yakni saat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MESDM) Indonesia terpilih menjadi Presiden dan Sekjen sementara OPEC. Indonesia akhirnya keluar dari OPEC pada tanggal 28 Mei 2008. Menurut Mantan Gubernur OPEC untuk Indonesia, Meizar Rahman, Indonesia sebenarnya tidak keluar dari OPEC. Status keanggotaan Indonesia hanya dibekukan atau disuspensi. Indonesia membekukan status keanggotaannya pada tahun 2008 karena posisi Indonesia sebagai importir minyak membuat munculnya ketidakcocokan dengan negara-negara eksportir minyak yang menjadi anggota OPEC lainnya. Kendati disuspensi, namun Indonesia tetap menjalin hubungan baik dengan OPEC, termasuk dalam menjalin hubungan bilateral dengan sejumlah negara OPEC.

Pemerintah Indonesia pun terus berupaya untuk bisa mengaktifkan keanggotaan di organisasi tersebut. Menurut Gubernur Indonesia untuk OPEC, DR. Widhyawan Prawiraatmadja, salah satu alasan Indonesia kembali jadi anggota OPEC adalah sebagai langkah dalam upaya peningkatan ketahanan energi. Hal ini terkait dengan kondisi Indonesia yang memiliki kebutuhan energi yang cukup tinggi dan terus meningkat. Selain itu,

Indonesia berada dalam proses transisi dari penggunaan energi yang didominasi energi fosil menuju energi baru terbarukan. Untuk itu, dalam mendukung ketahanan energi ini, Indonesia mengambil sejumlah langkah, baik dari dalam negeri ataupun luar negeri.

Pada tahun 2015 dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia telah mengajukan diri untuk bergabung kembali pada keanggotaan OPEC setelah 7 tahun ditanggihkan keanggotaannya oleh OPEC. Pemerintah memiliki alasan ingin mengambil manfaat yang maksimal dan sebesar-besarnya apabila Indonesia aktif kembali di dalam OPEC. Aktifnya kembali Indonesia di OPEC juga dipercaya akan memberikan keuntungan dan semakin mempererat hubungan dengan Negara-negara pengekspor minyak yang ada. Sidang Ke-168 OPEC di Wina, Austria, 4 November 2015, memiliki arti penting bagi Indonesia sebagai salah satu produsen minyak di dunia. Dalam sidang tersebut, Indonesia resmi aktif kembali sebagai anggota Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (Organization of the Petroleum Exporting Countries/OPEC) setelah sempat keluar pada bulan September 2008.

Kepentingan Indonesia untuk bergabung kembali ke OPEC pada tahun 2015 tidak semata-mata hanyalah untuk kepentingan ekonomi saja. Dalam hal ini, Indonesia memiliki dua sisi kepentingan yang diharapkan akan terwujud apabila Indonesia bergabung

kembali ke OPEC. Kepentingan tersebut adalah kepentingan ekonomi dan kepentingan politik.

Kepentingan Ekonomi

Perkembangan ekonomi dunia yang begitu pesat telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan dan mempertajam persaingan yang menambah semakin rumitnya strategi pembangunan yang mengandalkan ekspor. Di satu pihak, hal itu merupakan tantangan dan kendala yang membatasi. Di pihak lain, hal tersebut merupakan peluang baru yang dapat dimanfaatkan untuk keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional.²

Perekonomian dunia mengalami perubahan sejak dasawarsa tujuh puluhan hingga menjelang tahun 2000 yang bersifat mendasar atau structural dan mempunyai kecenderungan jangka panjang atau konjungtural. Perkembangannya menarik, yang istilahnya sangat populer akhir-akhir ini adalah globalisasi. Gejala globalisasi terjadi dalam kegiatan financial, produksi investasi, dan perdagangan yang kemudian mempengaruhi tata hubungan ekonomi antarbangsa. Proses globalisasi tersebut telah meningkatkan kadar saling ketergantungan antar Negara, bahkan menimbulkan proses menyatunya ekonomi dunia, sehingga batas-batas antarnegara di berbagai praktik dunia

² Drs. Hendra Halwani, M.A dan Dr. H Prijono Tjiptoherijanto. *Perdagangan Internasional*

“Pendekatan Ekonomi Mikro & Makro. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1993. Hal 211

usaha/bisnis seakan-akan dianggap tidak berlaku lagi.³

Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) sebagai organisasi internasional yang berusaha menjadi stabilisator penyelenggaraan minyak dunia memiliki peranan yang cukup strategis dalam pemerataan persediaan minyak dunia, baik produksi minyak, maupun distribusi minyak ke Negara-negara pengimpor minyak murni (net oil importer). Kebijakan-kebijakan dan langkah yang diambil OPEC tentu saja memiliki pengaruh yang sangat besar bagi tiap Negara anggotanya. Hal ini juga ikut dirasakan oleh Indonesia sebagai Negara yang tergabung dalam keanggotaan OPEC (pada tahun 1962-2006, 2007-2008, 2008-2013). Salah satu kebijakan yang paling berpengaruh bagi perekonomian Indonesia adalah ketika Indonesia tidak mampu lagi memenuhi kuota ekspor yang merupakan syarat yang ditetapkan OPEC bagi seluruh anggotanya. Hal ini membuat Indonesia menyandang gelar Net oil Importer (Negara pengimpor minyak), bukan lagi net oil eksporter (Negara pengeksport minyak). Pada saat itu Indonesia di bekukan sementara keanggotaannya (disuspensi) oleh OPEC. Hal ini juga diakibatkan oleh kebijakan OPEC membatasi ekspor minyak tiap Negara anggotanya dan menyebabkan Indonesia sebagai Negara anggota yang pada waktu itu mengalami krisis permintaan BBM domestic merasa dirugikan atas dikeluarkannya kebijakan OPEC tersebut. OPEC membuat kebijakan memangkas produksi minyak sebesar

1,2 juta barel perhari, dimana Indonesia dalam hal ini diharuskan mengurangi produksi minyak hingga 37.000 barel perhari. Permintaan ini tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah Indonesia yang justru ingin meningkatkan penerimaan dari sector minyak dan gas bumi.

Pada tahun 2015, ketika Indonesia secara resmi sudah mampu kembali menjadi Negara pengeksport minyak, Indonesia bermaksud kembali ke OPEC. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia di bidang perminyakan. Pemerintah berharap akan mendapat keuntungan yang besar jika bergabung kembali ke OPEC. Keuntungan tersebut adalah langkah dalam upaya peningkatan ketahanan energi. Hal ini terkait dengan kondisi Indonesia yang memiliki kebutuhan energi yang cukup tinggi dan terus meningkat. Selain itu, Indonesia berada dalam proses transisi dari penggunaan energi yang didominasi energi fosil menuju energi baru terbarukan. Untuk itu, dalam mendukung ketahanan energi ini, Indonesia mengambil sejumlah langkah, baik dari dalam negeri ataupun luar negeri.

Kepentingan Politik

Indonesia sebagai salah satu produsen minyak terbesar di dunia memiliki sejarah hubungan yang cukup panjang dengan OPEC. Hubungan yang terjalin tentu saja bukan terjadi hanya diantara Indonesia dan OPEC saja, tetapi juga Indonesia dan Negara-negara anggota OPEC. OPEC sesuai dengan visi dan misinya yaitu

³ Op cit hal 211

mempertahankan harga minyak dan menentukan harga sehingga menguntungkan negara-negara produsen, juga secara politik bertujuan untuk mengatur hubungan dengan perusahaan-perusahaan minyak asing atau pemerintah negara-negara konsumen. Dengan pengaktifan keanggotaan di OPEC ini, Indonesia diharapkan bisa menjadi bagian dalam proses pengambilan keputusan, bukan hanya sebagai penerima akibat dari keputusan tersebut. Tidak hanya itu, Indonesia juga harus mampu memanfaatkan peluang dari pergaulan atau *network* di organisasi energi internasional. Peluang itu antara lain adanya kesempatan yang luas untuk percepatan alih teknologi, kesempatan bisnis yang saling menguntungkan, akses pada penelitian dan pengembangan terkini.

Secara Politis, keanggotaan Indonesia di OPEC akan memberikan berbagai keuntungan, yaitu meningkatkan posisi Indonesia dalam proses tawar-menawar dalam hubungan internasional. Kedudukan Menteri ESDM dalam kapasitasnya sebagai Presiden Konferensi OPEC sekaligus acting Sekjen OPEC pada tahun 2004, telah memberikan posisi tawar yang sangat tinggi dan strategik serta kontak yang lebih luas dengan negara – negara produsen minyak utama lainnya.

Kesimpulan

Turki telah melakukan upaya-upaya untuk menolak hasil referendum yang dilakukan suku Kurdi Irak 27 September antara lain, mengintervensi Irak agar tidak mensahkan hasil referendum tersebut, kemudian melakukan pemboikotan terhadap

minyak dari KRG serta melakukan latihan militer di wilayah perbatasan. Seperti halnya banyak negara baru, nampaknya Wilayah Kurdistan tidak akan mendapatkan restu dari beberapa aktor di wilayah tersebut jika menyatakan kemerdekaan, dan kelahirannya sebagai sebuah negara dapat disertai perang.

Oleh karena itu, kepemimpinan yang berani dan kuat merupakan keharusan bagi Wilayah Kurdistan. Sebuah negara baru dalam pembuatannya juga mensyaratkan minimal legitimasi internasional untuk menjadi independen dan yang mengejutkan saat ini adalah kurangnya reaksi keras terhadap pengumuman mengenai kemungkinan kemerdekaan Kurdi dan perasaan bahwa "baik wilayah dan dunia menjadi semakin reseptif terhadap Kurdistan yang independen. Perpecahan politik adalah masalah yang masih ada di Wilayah Kurdistan mungkin ini adalah penyelesaian yang paling sulit. Sementara euforia awal setelah kemerdekaan mungkin sedikit mengurangi intensitas tantangan ini dalam beberapa bulan pertama, kemungkinan akan muncul kembali sejak awal. Isu pemersatu pasukan Peshmerga telah berada dalam agenda Kurdi Irak selama hampir tiga dekade, dan jelas beberapa langkah besar telah diambil dalam hal ini, walaupun tidak cukup.

Namun, beberapa kesulitan ekonomi akan lebih mudah ditangani begitu Daerah Kurdi mendapatkan kemerdekaan dan mampu mengeluarkan mata uangnya sendiri, mengendalikan nilai tukar, dan mendapatkan pinjaman

yang diperlukan untuk membangun negara. Dukungan asing untuk kemerdekaan kemungkinan akan agak diredam. Tidak diharapkan baik Turki atau AS akan memberi KRG lampu hijau, tapi akan menjadi prestasi jika para aktor ini tidak menghadirkan Barzani dengan lampu merah. Iran mungkin akan terus menjadi lawan setia kemerdekaan Kurdi, namun kemungkinan bahwa hal itu akan menyerang entitas baru ini, kemungkinan untuk mencoba dan memperkuat hubungannya dengan PUK dan bertindak secara subversif dari dalam negara.

Daftar Pustaka

Jurnal :

Andrea H.Pareira, " Negara dalam studi Hubungan Internasional: perubahan dan kesinambungan" jurnal antar bangsa II. 2004

Morton, Halperin. Bureaucratic Politics: A paradigm and Some Policy Implication, World Politics, vol .24

Stansfield, Gareth and Liam Anderson. 2017. *Kurds in Iraq: The Struggle Between Baghdad and Erbill*. U.S. : Middle East Policy Council volume XVI No.1

Ulutas, Ufuk. *Barzani's Quest for Independence and Why Turki is against It*. SETA PERSPECTIVE no: 32 September 2017 www.setav.org. Diakses 09 Maret 2018

Buku :

Jackson, Robert dan George Sorensen. 1999.*Introduction to International*

Relations. Denmark: Oxford University Press

Kuncahyono, Trias. 2005. *BulanSabit di Atas Baghdad*. Jakarta :Kompas Media Nusantara

Morgan, Patrick. 1990. *Theories and Approaches to International Politics, dalam Mas'ood, Mohtar, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Ilmu dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES

Sihbudi, Riza, M.. 1991. *Bara Timur Tengah*. Bandung: Mizan

Tejel, Jordi. 2009. *Syria Kurds, History, politics and society*. USA : Routledge

Uyanik, Mehmet. *Turki and the KRG After the Referendum: Blocking the Path to Independence*. CSIS Turki Project 22 November 2017

Website :

HumeyraPamuk&OrhanCoskun, "Exclusive: Turki, Iraqi Kurdistan ink landmark energy contracts," Reuters, 29 November 2013, <http://www.reuters.com/article/us-Turki-iraq-oilandUSBRE9AS0BO20131129>. Diakses 09 Maret 2018

Martin Chulov, "More Than 92% of Voters in Iraqi Kurdistan Back Independence," 28 September 2017, <https://www.theguardian.com/world/2017/sep/27/over-92-of-iraqs-kurds-vote-for-independence>. Diakses 09 Maret 2018

"Turkish MP Slams Kurdish Referendum as 'Neither Constitutional, Nor Legitimate,'" 27

September 2017,
<https://sputniknews.com/analysis/201709271057759463-turkish-mp-Kurdish-referendum-illegitimate/>. Diakses 09
Maret 2018.

